



960 Ribu Pelajar-Mahasiswa Terlibat Judi Online

Jakarta, MIMBAR - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikristek) Satryo Soemantri Brojonegoro mengungkapkan ada 960 ribu pelajar dan mahasiswa yang terjerat judi online.

“Terkait dengan judi online. Maka kelompok pelajar dan mahasiswa yang terlibat sampai saat ini berjumlah 960 ribu, sebagian besar mahasiswa,” kata Satryo di Kantor Komdigi, Jakarta, Kamis (21/11). Satryo kemudian memerintahkan kepada pemimpin perguruan tinggi

swasta untuk mencegah keterlibatan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan supaya tak terlibat judi online.

Satryo mengatakan, mahasiswa yang terdampak dengan judi online

■ Bersambung ke Hal 11

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Budi Gunawan memimpin penyampaian keterangan terkait capaian desk pemberantasan perjudian daring/online dan keamanan siber serta perlindungan data di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Kamis (21/11/2024).



SETYO BUDIYANTO PIMPIN KPK 2024-2029

Polisi ‘Gagal’ Gantikan Polisi TSK Suap

Jakarta, MIMBAR - Komisi hukum DPR dipimpin ketuanya, Habiburokman (Gerindra), Kamis (21/11), menetapkan Komjen Setyo Budiyanto (57), terakhir menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, sebagai Ketua KPK periode 2024-2029.



PERTEMUAN PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO DENGAN RAJA INGGRIIS CHARLES III DI ISTANA BUCKINGHAM :

Usai menghadiri rangkaian KTT G20 di Brasil, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke Inggris. Di Inggris, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengadakan sejumlah pertemuan, termasuk bertemu Raja Charles III. Presiden Prabowo juga diagendakan untuk menghadiri acara CEO Roundtable Forum. Untuk diketahui, Presiden Prabowo dan rombongan sudah tiba di Bandara Stansted, London, Inggris, pada Rabu 20 November 2024 pagi waktu setempat. (Foto Liputan6.com)

Perwira tinggi polisi inilah yang gagal mencegah menterinya, Syahrul Yasin Limpo (SYL), melakukan korupsi. Kini, dia pula yang akan menggantikan koleganya, Komjen Firlil Bahuri

(61), juga jadi tersangka (TSK) berkaitan dengan kasus SYL, sebagai Ketua baru KPK. Sekarang, kepemimpinan KPK diteruskan

■ Bersambung ke Hal 11

Cuma Basa-basi

KOALISI Masyarakat Sipil yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Transparency International Indonesia (TII) menuding pimpinan KPK periode 2024-2029 sudah dikondisikan. Menurut mereka,

■ Bersambung ke Hal 11



Buruh Protes Kenaikan PPN

ANCAM AKSI MOGOK NASIONAL

Jakarta, MIMBAR - Kelompok buruh mengancam menggelar aksi mogok kerja nasional jika pemerintah tetap menaikkan PPN menjadi 12 persen pada Januari 2025. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan aksi itu

rencananya minimal akan digelar selama dua hari. “Aksi ini direncanakan akan menghentikan produksi selama minimal dua hari,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (21/11).

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

20 JUMADIL AWAL 1446 H

Subuh : 04:54 WIB	Maghrib : 18:12 WIB
Zuhur : 12:15 WIB	Isya : 19:25 WIB
Ashar : 15:37 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Jagalah Hati

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UINSU)



DALAM pandangan Alqur'an, hati (qalb) adalah pusat spiritual dan emosional sangat penting. Kondisi hati menentukan hubungan manusia dengan Allah, kemampuan memahami kebenaran, serta kualitas hidup. Karena itu, menjaga hati tetap bersih dari penyakit hati seperti kesombong, iri, dan lalai merupakan salah satu aspek penting dalam Islam.

Dalam Alqur'an, qalb memiliki makna mendalam dan multidimensional. Hati seringkali tidak hanya merujuk pada organ fisik,

■ Bersambung ke Hal 11

Soal Usulan Penghapusan OTT

Sesat Pikir Capim KPK

PENGAMAT mencibir usul calon pimpinan KPK petahana Johanis Tanak yang dalam fit and proper test di DPR menyatakan agar operasi tangkap tangan (OTT) pelaku tindak pidana korupsi ditiadakan saja, karena tak sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pengamat mengatakan OTT itu justru selama ini menjadi salah satu giat terdepan KPK dalam memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) Zaenur Rohman berpendapat OTT diperlukan KPK untuk pengungkapan kasus-kasus suap, sehingga tak hanya berpatok pada konstruksi penyidik membangun pengungkapan kasus (case



building) saja. Selain itu, dia mengatakan OTT juga mampu menimbulkan efek gentar bagi pihak yang punya niat melakukan tindak pidana korupsi. “Kalau rencana Tanak ini nanti akan diterapkan di KPK, tidak ada lagi OTT, ya tentu para pelaku tindak korupsi akan sangat senang dan mereka tidak akan takut lagi dan KPK kehilangan deterrent effect (efek gentar) di dalam pemberantasan korupsi,” kata Zaenur, dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis

(20/11) malam. Menurutnya, pernyataan Tanak yang ingin menghapus OTT itu adalah sesat pikir yang sekadar ingin mengambil hati dan menyenangkan anggota DPR. Pasalnya, kata dia, anggota DPR adalah penyelenggara negara yang juga rentan terhadap tindak pidana korupsi sehingga takut terkena OTT. “Anggota DPR itu paling takut sama OTT, karena anggota DPR itu penyelenggara negara yang paling

■ Bersambung ke Hal 11

Target Swasembada Pangan RI Dipercepat

Jakarta, MIMBAR - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap target mewujudkan swasembada pangan dipercepat dari yang awalnya pada 2028 menjadi 2027.

Menurutnya, hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya di sejumlah forum internasional seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

“Kita kan perintah presiden swasembada (pada) 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di

■ Bersambung ke Hal 11



■ Keluar dari mulut macan masuk mulut harimau ...
■ Ckckck...

Target Swasembada....

Dari Halaman 1

G20, di APEC, bukan 2028, (jadi) 2027,” ujar dia dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Zulhas menyebut pemerintah memiliki waktu kurang lebih dua tahun untuk mengejar target tersebut. Oleh karena itu, pihaknya perlu mempercepat kebijakan dalam menggenjot produksi.

“Jadi tinggal tahun depan, tahun satunya, sudah tuh, sampai. Jadi kita punya waktu dua tahun. Dua tahun harus bekerja keras. Oleh karena itu kamu juga harus cepat,” tuturnya.

Sebagai bagian dari percepatan swasembada pangan, pemerintah mengejar beberapa penyelesaian kebijakan. Pertama, menyusun peraturan presiden (Perpres) untuk neraca komoditas, perpes penyaluran pupuk subsidi, hingga usulan usaha bidang pangan di bawah Kementerian Pertanian.

Untuk penyaluran pupuk subsidi, Zulhas menjelaskan aturannya bakal dipangkas agar tidak menghambat. Ke depannya, untuk penyaluran pupuk tak lagi diperlukan Surat Keputusan (SK) pemerintah daerah (pemda).

“Dulu ada aturan harus ada SK Bupati, SK Gubernur, SK Menteri Perdagangan, macam-macam banyak sekali sehingga mengular, itu sudah dipangkas. Nanti

cukup SK Mentan (Menteri Pertanian). Mentan tugaskan Pupuk Indonesia, langsung ke penyalur atau ke kios atau ke Gapoktan (kebugangan kelompok tani),” ucap dia.

Selain itu guna mencapai swasembada pangan lebih cepat, pemerintah berencana mengubah Perum Bulog menjadi badan otonom di bawah presiden. Artinya, Bulog tak lagi melakukan pengadaan untuk komersial seperti perusahaan.

Ada pula usulan beberapa badan bidang pangan bakal berada di bawah koordinator Kementerian Pertanian, seperti Badan pangan Nasional dan Badan Karantina Nasional.

Lebih lanjut, Zulhas berharap dengan dipercepatnya target swasembada pangan, Indonesia tak akan lagi mengimpor beras pada 2025.

“Mudah-mudahan tahun depan kita enggak impor beras. Kalau impor pun sedikit. Ini sedang kerja keras semua dalam rangka itu,” tuturnya.

Sementara itu, pemerintah juga telah menargetkan impor beras sebanyak 3,6 juta ton sepanjang 2024. Sebanyak 2,8 juta diantaranya telah masuk ke Indonesia.

“Sehingga nanti Pak Presiden kalau datang ke G20 kan gagah, ‘saya enggak impor beras’. Jadi kita sedang bekerja keras. Kalau bisa tahun depan tidak impor beras,” tegasnya.(**cnni/js**)



Hidayah

Jagalah Hati

Dari Halaman 1

tetapi juga pada aspek spiritual, emosional, dan intelektual manusia.

Alqur'an di satu sisi memandang hati sebagai pusat keimanan dan kesadaran spiritual. Hati dianggap sebagai pusat iman dan keyakinan. Kondisi hati menentukan kualitas hubungan seseorang dengan Allah. Sebagaimana firman Allah yang artinya; (Yaitu) pada hari (ketika) harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih (qalibun salim). (QS. Ash-Shaffat: 88-89).

Hati yang bersih adalah hati yang bebas dari syirik, iri, dengki, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menamakan keimanan dalam hati mereka... (QS. Al-Mujadilah: 22).

Sisi lain hati sebagai tempat pemahaman dan refleksi. Hati juga dipandang sebagai pusat akal dan pemahaman mendalam, bukan hanya otak dalam konteks spiritual. Hati yang tidak memahami dianggap lalai: Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga mereka mempunyai hati yang dengannya mereka dapat memahami... (QS. Al-Hajj: 46).

Alqur'an juga menyebutkan bahwa hati dapat menjadi tempat penyakit, seperti keraguan, kesombongan, atau kebencian. Penyakit dalam hati: Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu... (QS. Al-Baqarah: 10).

Islam menekankan pentingnya menjaga hati agar tetap bersih dan dekat dengan Allah. Zikrullah membersihkan hati: Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. (QS. Ar-Ra'd: 28).

Hati yang dipenuhi rasa takut kepada Allah: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya... (QS. Al-Anfal: 2).

Dalam teori komunikasi, menjaga hati tetap bersih dari penyakit seperti kesombongan, iri, dan kelaianan memiliki relevansi yang erat dengan komunikasi interpersonal dan etika komunikasi. Komunikasi interper-

sonal melibatkan hubungan antarindividu yang sehat dan efektif. Penyakit hati seperti kesombongan, iri, dan kelaianan dapat menjadi penghalang komunikasi yang konstruktif.

Teori Pengelolaan Kesadaran Diri (Self-Awareness Management). Kesombongan sering muncul ketika seseorang terlalu berfokus pada citra dirinya dan kurang peduli terhadap orang lain. Dalam komunikasi, ini dapat menciptakan jarak dan mengurangi empati. Menjaga kerendahan hati membantu membangun hubungan yang lebih setara dan saling menghormati. Komunikasi yang efektif membutuhkan rasa kesetaraan. Kesombongan merusak ini dengan menciptakan hierarki yang tidak sehat.

Teori Kompetisi Sosial (Social Comparison Theory). Menurut Leon Festinger, manusia cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Iri muncul ketika seseorang merasa kurang dibandingkan dengan orang lain. Dalam komunikasi, rasa iri dapat memicu konflik, merusak kepercayaan, atau menghambat kerjasama. Mengelola rasa iri melalui kesadaran diri dan apresiasi terhadap keberhasilan orang lain dapat memperkuat hubungan interpersonal.

Teori Responsif dalam Komunikasi (Transactional Model of Communication) Komunikasi yang baik memerlukan perhatian penuh terhadap pesan yang disampaikan. Kelaianan mengganggu proses ini, misalnya dengan tidak mendengarkan aktif atau gagal memahami emosi lawan bicara. Dalam Islam, zikir atau ingat kepada Allah dapat diterjemahkan dalam komunikasi sebagai kesadaran penuh dalam setiap interaksi.

Dalam teori komunikasi, etika menjadi pedoman untuk membangun hubungan yang sehat dan bermartabat. Menjaga hati dari kesombongan, iri, dan kelaianan sangat relevan dengan prinsip etika komunikasi.

Teori Keseimbangan Emosi (Emotional Intelligence Theory). Daniel Goleman menekankan pentingnya kesadaran diri dan pengelolaan emosi dalam komunikasi. Penyakit hati seperti kesombongan dan iri adalah bentuk emosi negatif yang harus dikelola untuk membangun hubungan yang harmonis. (*)

Dari Halaman 1

oleh Nawawi Pomolango (62), hakim karir berdarah Gorontalo, usai pencopotan Firli pada November 2023, setelah jadi tersangka korupsi di Polda Metro Jaya.

VOTING

Penetapan Setyo jadi Ketua KPK baru, dilakukan berdasarkan pemungutan suara atau voting, setelah uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) 10 nama calon pimpinan KPK. Dari hasil voting, Setyo memperoleh 46 suara dari total 48 suara.

Hadir juga empat wakil ketua komisi hukum: Ahmad Sahroni (NasDem), Rano Al Fath (PKB), dan Dede Indra Permana (PDIP). Rapat dihadiri 48 anggota Komisi hukum DPR dari delapan fraksi secara langsung di ruang rapat pleno Komisi III.

Dalam rapat, Komisi III DPR RI juga menetapkan empat komisioner KPK terpilih, yakni: Fitroh Rohchahyanto; Ibnu Basuki Widodo; Johanis Tanak; dan Agus Joko Pramono.

Nantinya, nama-nama para komisioner terpilih tersebut segera dibawa ke rapat paripurna DPR untuk pengesahan. Selanjutnya, kelima komisioner KPK akan dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara. Sebelumnya, selama dua hari, 18 dan 19 November, 10 calon pimpinan KPK mengikuti fit and proper test.

Nama lain selain lima nama yang terpilih, ialah: Poengky Indarti, Michael Rolandi Chesnata Brata, Ida Budhiarti, Djoko Poerwanto, dan Ahmad Alamsyah Saragih. Johanis Tanak, satu-satunya komisioner petahana PKP.

SUARA KRITIS SAMARINDA

Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Unmul (Universitas Mulawarman) Samarinda, Herdiansyah Hamzah alias Castro, menilai, Ketua KPK 2024-2029, Setyo Budiyo, memiliki rekam jejak yang bermasalah.

Castro mengatakan Setyo, polisi yang berpangkal Komjen, akan membuatnya berada dalam konflik

Dari Halaman 1

merupakan korban dari para bandar judi online.

Karenanya, mereka perlu dilakukan upaya rehabilitasi. Bahkan, ia menyebut ada mahasiswa yang harus dirawat karena kelemahan mental.

“Tiap perguruan tinggi wajib untuk merehabili-

Dari Halaman 1

Said Iqbal mengatakan, rencana mogok nasional itu sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap menekan rakyat kecil dan buruh.

Ia mendesak pemerintah membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Lalu, mereka juga meminta kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen agar daya beli masyarakat meningkat. Kemudian, menetapkan upah minimum sektoral yang sesuai dengan kebutuhan tiap sektor. Terakhir, meningkatkan rasio pajak bukan dengan membebani rakyat kecil.

“Tetapi dengan memperluas jumlah wajib pajak dan meningkatkan penagihan pajak pada korporasi besar dan individu kaya,” katanya.

Said menyatakan rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025 itu hanya akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat kecil dan buruh. Ia menilai kebijakan itu hanya akan menurunkan daya beli secara signifikan, mengakibatkan kesenjangan sosial yang lebih dalam, dan menjauhkan target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mence-

Dari Halaman 1

seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test hanya basa-basi.

Menurut koalisi, di tengah krisis integritas, sudah seharusnya Komisi III DPR RI memilih calon pimpinan dan dewan pengawas KPK dengan rekam jejak baik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

“Basa-basi seleksi, pengondisian calon pimpinan KPK yang bisa kompromi korupsi,” ujar Julius Ibrani dari PBHI melalui keterangan persnya, Kamis (21/11).

Julius mengungkit panitia seleksi (pansel) yang diduga kuat memilih calon terafiliasi dengan Joko Widodo (Jokowi). Dugaan itu dibuktikan dari banyak calon yang memiliki rekam jejak cukup baik dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi dipenggal dalam proses tahap awal.

Pansel justru meloloskan nama-nama yang memiliki rekam jejak buruk. Ia menabahkan proses seleksi terkesan sekadar formalitas belaka.

“Seleksi wawancara yang dilakukan oleh Pansel

Dari Halaman 1

banyak diduga menerima suap dari para pengusaha, dari orang-orang yang dibantu urusannya dan seterusnya,” katanya.

Zaenur pun mempersoalkan pernyataan Anggota DPR yang meminta KPK mengingatkan penyelenggara sebelum melakukan korupsi.

“Ada politisi bertanya, ‘Kenapa tidak dicegah sebelum adanya suap? Kalau dicegah sebelum suap itu terjadi, padahal itu sudah ada informasi akan terjadi suap, maka pelaku akan membatalkan’. Padahal biasanya informasi akan adanya suap itu adalah kejadian yang kesekian kali, bukan merupakan pertama kali,” ujar Zaenur menyindir anggota DPR tersebut.

Zaenur mengatakan KPK justru sebaiknya lebih kencang lagi dengan meningkatkan OTT terhadap penyelenggara negara yang melakukan aksi tipikor. Selain itu, dia mengatakan setelahnya tetap perlu juga ada perbaikan sistem agar tidak pidana korupsi tidak berulang. “Pasca-OTT, dilakukan perbaikan sistem agar korupsi tidak terulang di instansi yang terkena OTT,” ujarnya.

Tak Berlawanan dengan KUHAP

Hampir senada, Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola berpendapat pernyataan Johanis Tanak soal OTT itu tak memiliki dasar di dalam KUHAP justru tidak tepat.

Menurut Alvin, tidak ada hukum acara pidana yang dilanggar dari OTT yang dilakukan KPK sejak berdiri dua dekade lalu.

Menurutnya, KUHAP tidak memperlakukan metode dalam penindakan kasus.

“Apakah lewat OTT atau case building (membangun kasus). Justru yang penting itu soal pembuktian-nya,” kata Alvin saat dihubungi Rabu malam lalu.

Alvin mengatakan di negara yang korupsinya sistemik seperti Indonesia, OTT bisa jadi pilihan metode penindakan yang strategis. Namun, imbuhnya, dengan syarat bahwa operasi tangkap tangan terhadap korupsi

Polisi ‘Gagal’....

kepentingan, ketika memimpin lembaga antirasuah tersebut.

Ia juga mengingatkan, sebelumnya KPK dipimpin Firli Bahuri berlatar belakang polisi. Firli pada akhirnya juga tersangkut kasus dugaan suap penanganan masalah hukum di Kementerian Pertanian.

Kata Castro, Kamis (21/11), “Kita sama-sama paham bagaimana pelajaran saat Firli.

Misalnya, (bila) yang memegang pimpinan KPK itu, pada akhirnya punya problem ketika berhadapan dengan institusi (asal)nya.”

“Jadi kita tidak bisa ingkari keberadaan pimpinan Polri di tubuh KPK itu, menyebabkan konflik kepentingan yang begitu sangat rawan, apalagi ketika proses perkara melibatkan anggota kepolisian.”

Sasaran pernyataan Castro, karena selain KPK, Polri dan Kejaksaan juga menangani kasus korupsi.

JEJAK

Castro juga menyoroiti rekam jejak Setyo secara personal. Setyo ternyata pernah tidak patuh melaporkan harta kekayaannya sebagai pejabat negara. “Kalau kita lacak rekam jejaknya juga bermasalah. Dia misalnya tidak patuh terhadap laporan harta kekayaan negara, kalau tidak salah LHKN-nya tahun 2023. Itu bertentangan dengan ketentuan berlaku sebagaimana prinsip transparansi dalam urusan LHKPN,” katanya.

Castro juga menyoroiti rekam jejak Setyo ketika menjadi Irjen Kemantan. Setyo gagal menjalankan tugasnya sebagai pengawas.

“Buktinya kan kementerian pertanian jebol dalam perkara Syahrul Yasin Limpo. Itu pertanda tugas dan fungsi Setyo, gagal,” katanya.

Komjen Setyo Budiyo terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 dalam Rapat Pleno Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

Setyo mendapat suara terbanyak dalam pemilihan capim KPK di Komisi III DPR dengan 45 suara yang memilih dirinya untuk menjadi ketua KPK.

Setyo akan memimpin lembaga antirasuah lima

960 Ribu...

tasi dan membantu memulihkan kondisi dari pasien tersebut. Setelah itu, mereka dipastikan untuk tidak lagi terjebak kepada judi online,” kata dia.

Di tempat yang sama, Menko Polkam Budi Gunawan merinci pemain judi online di Indonesia berjumlah 8,8 juta yang mayoritas merupakan kalangan menengah ke bawah.

Buruh Protes...

pai delapan persen.

“Lesunya daya beli ini juga akan memperburuk kondisi pasar, mengancam keberlangsungan bisnis, dan meniadakan potensi PHK di berbagai sektor,” ujarnya.

DPD Minta Tunda Kenaikan

Sementara, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai tahun depan.

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin khawatir jika PPN naik, maka tingkat inflasi juga ikut terkerek. “Tapi kami tidak pada posisi eksekutif. Kita hanya merekomendasikan coba dipikir ulang, dipikir ulang, ditinjau ulang (kenaikan PPN),” katanya di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).

Kendati meminta pemerintah menunda kenaikan PPN, Sultan mengatakan DPD tidak menghalangi pemerintah melaksanakan kebijakan itu jika sudah dipertimbangkan dengan matang.

DPD katanya tak memperlakukan jika pemerintah sudah melakukan simulasi bahwa dengan kenaikan PPN menjadi 12 persen bisa menambah penerimaan

Cuma Basa-basi

maupun fit and proper test di Komisi III DPR tidak mengali lebih dalam kepada calon terkait mulai dari tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan, harta kekayaan yang mengalami fluktuasi tidak wajar, nir-integritas dan potensi benturan konflik kepentingan, hingga langkah konkret dalam upaya membenahi kelembagaan KPK pascarevisi UU KPK 2019,” kata Julius.

Ia menilai lima orang pimpinan dan dewan pengawas KPK yang ditetapkan DPR memiliki rekam jejak buruk. Satu di antaranya ialah Johanis Tanak yang ada catatan pernah berkomunikasi dengan pejabat Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite. Percapaian yang beris “bisalah kita cari duit” itu sempat viral di media sosial. “Selain itu, dalam paparannya saat fit and proper test, Johanis Tanak menegaskan akan menghapus OTT KPK karena dianggap tidak sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku,” ucap Julius.

“Koalisi menilai bahwa Johanis Tanak tidak mampu mengukur efektivitas dan persentase keberhasilan pemberantasan korupsi melalui OTT, atau niat menghapus

Sesat Pikir...

itu harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. “Jadi enggak ada alasan materil maupun formil [jadi pembenar] kalau OTT itu dihentikan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia berpendapat memang banyak yang perlu dievaluasi dari sistem penindakan di KPK di era pimpinan sebelumnya. Evaluasi harus dilakukan pimpinan KPK ke depan.

“Misal di era Firli [Eks Ketua KPK Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri], banyak info bocor, suap penyidik dan lain-lain. Justru itu tugas pimpinan KPK ke depan, untuk mengevaluasi itu,” ucapnya.

Sementara itu, Indonesia Memanggil (IM57+) Institute mengaku tidak terkejut dengan keinginan Johanis Tanak yang ingin menghapus OTT. Hal tersebut dihubungkan dengan berbagai catatan potensi etik yang pernah ada selama kepemimpinannya di KPK.

“Pada sisi kinerja, minimnya prestasi KPK dalam pengungkapan kasus korupsi menjadi cerminan justifikasi JT (Johanis Tanak) untuk membenarkan apa yang dilakukan selama di KPK,” kata Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito.

Yang cukup mengkhawatirkan, kata Lakso, adalah pernyataan tersebut diucapkan ketika instansi asal Johanis Tanak yaitu Kejaksaan Agung mulai mengadopsi pendekatan OTT (red handed) pada berbagai kasus yang memang dikenal dalam praktik pemberantasan kejahatan pada skala internasional.

“Suatu kejangalan ketika praktik tersebut diterapkan dan diadopsi penegak hukum lain, malah KPK meninggalkannya. Padahal, OTT adalah pintu masuk membongkar kejahatan yang lebih serius,” ucap Lakso.

Di sisi lain, Lakso menganggap keinginan Johanis Tanak menghapus OTT menjadi pembuktian bagi DPR dan presiden untuk tidak mengulangi kesalahan dalam pemilihan calon pimpinan KPK sebelumnya.

“Kami teringat bagaimana statement-statement kontroversial Firli Bahuri dikeluarkan pada uji publik di DPR lima tahun lalu yang ternyata terbukti membawa kehancuran pemberantasan korupsi pascaterpilih menjadi pimpinan KPK,” ungkap Lakso.

tahun mendatang bersama Johanis Tanak, Fitroh Rohchahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono. Johanis dan Fitroh meraih suara terbanyak dengan 48 suara. Disusul Setyo 46 suara, Agus Joko 39 suara, dan Ibnu Basuki 33 suara.

Setyo merupakan perwira tinggi Polri dengan pangkat Komjen alias bintang tiga yang bertugas sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian sejak Maret 2024.

Dalam rapat siang ini, anggota Komisi III DPR memilih lima nama dari 10 nama capim KPK periode 2024-2029 yang telah mengikuti (fit and proper test).

Masing-masing anggota dewan wajib memilih lima nama dalam selebrar surat suara. Nama capim KPK yang mendapat suara terbanyak terpilih menjadi pimpinan KPK. Dari lima nama tersebut, satu di antaranya akan terpilih sebagai ketua. Total ada 44 orang dari 47 anggota Komisi III yang hadir dari 8 fraksi.

“Anggota Komisi III wajib memilih lima capim dan lima calon dewan,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman.

Selain itu, rapat pleno juga akan menetapkan lima dari 10 nama calon sebagai anggota Dewan Dewas KPK periode 2024-2029. Pemilihan anggota Dewan ini berbarengan dengan pemilihan APK.

Fit and proper test terhadap capim dan calon dewan KPK telah digelar secara maraton oleh Komisi III DPR selama empat hari sejak Senin 18 November lalu.

Total ada 20 nama yang akan menjalani proses tersebut, masing-masing 10 capim dan 10 calon dewan KPK. Komisi III DPR akan menetapkan masing-masing lima di antara keduanya. Mereka akan dipilih dan dilantik untuk menggantikan para pimpinan dan anggota Dewan KPK yang habis Desember 2024.

Berikut daftar 10 nama capim KPK yang telah mengikuti fit and proper test, Agus Joko Pramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Djoko Poerwanto, Fitroh Rohchahyanto. Kemudian Ibnu Basuki Widodo, Ida Budhiarti, Johanis Tanak, Michael Rolandi Cesnanta Brata, Poengky Indarti, dan Setyo Budiyo. (**kps/mi/cp/cnni/js**)

Ia juga mengatakan ada 97 ribu anggota TNI-Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. “80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya masif di dalam memberantas judi online ini,” kata Budi. (**cnni/js**)

negara untuk membiayai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis.

“Kami tidak akan menghalangi pemerintah kalau ternyata simulasinya sudah matang betul bahwa menaikkan pajak sekian persen akan mendapatkan sumber untuk membiayai program-program strategis. Contohnya Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan dan energi, dan lain-lain,” imbuhnya.

PPN Indonesia akan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara (ASEAN) jika naik menjadi 12 persen pada 2025. Tarif PPN Indonesia akan menjadi yang teratas di kawasan bersama Filipina yang sudah lebih dulu memperlakukan tarif pajak 12 persen.

Menulik data Worldwide Tax Summaries yang dirilis konsultan keuangan PWC, tarif PPN Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi ke-2 di ASEAN. Setelah itu, Malaysia, Laos, Vietnam, dan Kamboja mengekor dengan besaran tarif masing-masing 10 persen. Selanjutnya, Singapura menerapkan tarif PPN 9 persen, Thailand 7 persen, dan Myanmar 7 persen.

Sementara itu, Brunei menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memungut PPN kepada warganya. (**cnni/js**)

OTT karena adanya transaksi politik dengan seseorang dan/atau kelompok tertentu sehingga menjadikan KPK sebagai lembaga yang mati suri dalam menjalankan mandatnya sebagai pemberantas korupsi,” sambung-nya.

Julius menambahkan komposisi Komisioner KPK periode 2024-2029 yang didominasi oleh penegak hukum menjadi tantangan untuk mengaktifkan kembali fungsi trigger mechanism KPK. Semangat itu muncul ketika Kejaksaan dan Kepolisian dianggap belum cukup efektif dalam memberantas korupsi.

“Faktanya, calon yang dipilih oleh DPR adalah mereka dengan rekam jejak Kejaksaan dan Kepolisian yang juga tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi di lembaga sebelumnya. Bahkan, Kejaksaan dan Polri menjadi lembaga yang paling banyak melakukan korupsi,” ucap Julius.

Dalam keterangannya, ia menyayangkan sikap abai Komisi III DPR terhadap catatan rekam jejak calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dikirim oleh koalisi. (**cnni/js**)

“Kalau DPR melakukan hal yang sama maka bukanlah kejutan bagi publik. Akan tetapi, apabila ternyata DPR merealisasikan janji perubahan KPK, maka itu adalah legacy pemerintahan baru Indonesia,” tegasnya.

Saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan KPK periode 2024-2029 di Komisi III DPR, Selasa (19/11), Johanis Tanak mengaku akan menghapus OTT apabila terpilih kembali menjadi Komisioner KPK.

Capim petahana KPK itu menilai konsep OTT tidak tepat berdasarkan terminologi maupun aturan KUHAP.

“Seandainya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua [rapat seleksi di Komisi III DPR], saya akan tutup, close, karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHAP,” kata Johanis disambut tepuk tangan para anggota DPR saat itu.

Menurut Tanak, secara terminologi definisi OTT tidak tepat. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata dia, operasi adalah serangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan layaknya dilakukan seorang dokter. Sementara menurut KUHAP, tertangkap tangan menghendaki penangkapan yang dilakukan seketika dan tanpa perencanaan.

“Nah kalau ada suatu perencanaan operasi itu, terencana, satu dikatakan suatu peristiwa itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih. Itu tidak tepat. Ya menurut hemat saya OTT itu tidak tepat,” katanya.

Tanak menjadi satu dari sepuluh capim KPK yang namanya disetor Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya untuk dipilih lima orang oleh DPR guna memimpin KPK periode 2024-2029.

Johanis Tanak saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Ia mulai menduduki jabatan itu Oktober 2022 menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri karena dugaan gratifikasi dari PT Pertamina terkait akomodasi dan tiket menonton MotoGP Mandalika. Saat menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Tanak juga sempat terjatir dugaan pelanggaran etik, tetapi dinyatakan tak bersalah. (**cnni/js**)